

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow program kegiatan*). Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam APBD.

Analisis pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan seperti pada Kabupaten Minahasa Selatan terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD.

Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

Selanjutnya, dibuatlah analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- (1) Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
- (2) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- (3) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- (4) Kebijakan dibidang keuangan negara.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2010-2015 diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan dilengkapi beberapa kali terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2006 yang mengatur tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati nomor 8 tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2009 tentang kebijakan Akuntansi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Minahasa Selatan

Pembahasan kinerja APBD tentunya akan selalu merujuk pada struktur APBD yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Sumber Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba

perusahaan milik daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP) sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan Lain-Lain PAD yang sah yang meliputi Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi, Dana Penyesuaian dan Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Struktur Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan bahwa realisasi PAD dari total Pendapatan Daerah dari tahun 2011 – 2015 menunjukkan kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 38,07 persen, Dana Perimbangan dengan rata-rata kenaikan 22,45 persen dan Lain-lain PAD Yang Sah dengan rata-rata kenaikan sebesar 18,73 persen dari total realisasi Pendapatan Daerah.



Tabel 3.1.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2011 s/d Tahun 2015
Kabupaten Minahasa Selatan

| No | Uraian | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| 1 | PENDAPATAN | 515.891.353.257 | 537.329.647.572 | 604.614.969.408 | 684.371.721.501 | 868.991.454.402 | 20,85 |
| 1.1. | Pendapatan Asli Daerah | 9.407.280.004 | 10.620.087.945 | 14.406.092.809 | 26.137.234.620 | 32.567.773.521 | 38,07 |
| 1.1.1 | Pajak daerah | 4.125.988.779 | 4.620.514.861 | 6.039.092.849 | 8.796.148.283 | 8.951.129.640 | 22,53 |
| 1.1.2 | Retribusi daerah | 1.407.335.820 | 234.874.323 | 1.896.320.372 | 1.989.213.244 | 2.752.874.889 | 166,84 |
| 1.1.3 | Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan | 308.178.078 | 320.271.553 | 436.261.651 | 386.949.227 | 353.475.045 | 5,05 |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD yang sah | 3.565.777.327 | 5.444.427.208 | 6.034.417.937 | 14.964.923.866 | 19.908.271.114 | 61,14 |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 392.648.972.741 | 461.517.065.489 | 503.567.777.126 | 544.861.074.752 | 844.320.663.714 | 22,45 |



| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 1.2. 1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 16.347.166.438 | 10.542.069.265 | 19.031.515.509 | 12.179.072.204 | 11.106.645.950 | 0,05 |
| 1.2. 1 | Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) | 2.224.835.303 | 10.853.314.224 | 1.052.028.617 | 2.966.787.548 | 3.836.772.712 | 127,21 |
| 1.2. 2 | Dana alokasi umum | 330.854.571.000 | 388.510.062.000 | 435.848.663.000 | 476.105.045.000 | 494.327.305.000 | 10,67 |
| 1.2. 3 | Dana alokasi khusus | 43.222.400.000 | 51.611.620.000 | 47.635.570.000 | 53.610.170.000 | 153.290.660.000 | 52,55 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 113.835.099.512 | 65.192.494.138 | 86.641.099.473 | 113.373.412.129 | 174.464.320.052 | 18,73 |
| 1.3. 1 | Hibah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. 2 | Dana darurat | - | - | - | - | 7.294.960.000 | |
| 1.3. 3 | Dana bagi hasil pajak dari provinsi | 11.431.592.952 | 9.381.808.138 | 14.834.521.473 | 14.145.787.129 | 14.238.271.052 | 9,05 |



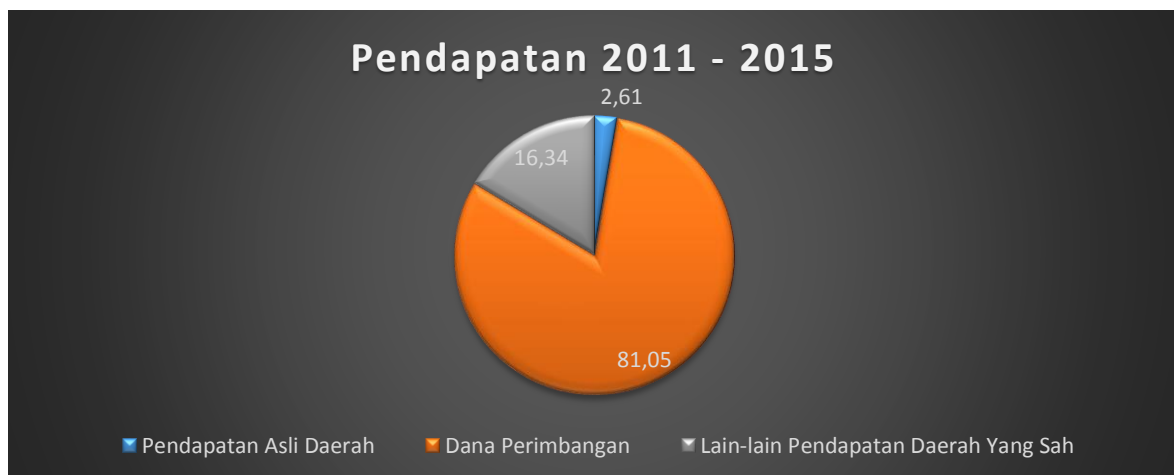
| | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------|
| 1.3. 4 | Dana penyesuaian | 102.403.506.560 | 55.810.686.000 | 71.806.578.000 | 95.658.825.000 | 152.931.089.000 | 19,06 |
| 1.3. 5 | Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | - | - | - | 3.568.800.000 | - | 20,85 |

Sumber: DPKPA & Bappeda Kab. Minahasa Selatan, 2016



Berdasarkan persentase dari total pendapatan daerah dari tahun 2011 sampai 2015 menunjukkan bahwa sumber Pendapatan terbesar berasal dari Dana Perimbangan, yaitu sebesar 81,05%, diikuti Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 16,34 dan Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi terkecil yaitu hanya sebesar 2,61%. Dari ketiga kelompok pendapatan daerah dalam struktur APBD Kabupaten Minahasa Selatan, Dana Perimbangan masih berperan besar dalam pembentukan struktur APBD. Tercatat selama lima tahun terakhir, kontribusi Dana Perimbangan yang mencapai 81,05% menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap pembiayaan dari Pemerintah Pusat. Mengingat otonomi daerah telah mengamanatkan kemandirian daerah, khususnya dalam hal pendanaan sehingga upaya terhadap peningkatan PAD masih menjadi pekerjaan rumah sekaligus agenda utama bagi pemerintah daerah (Gambar 3.1).

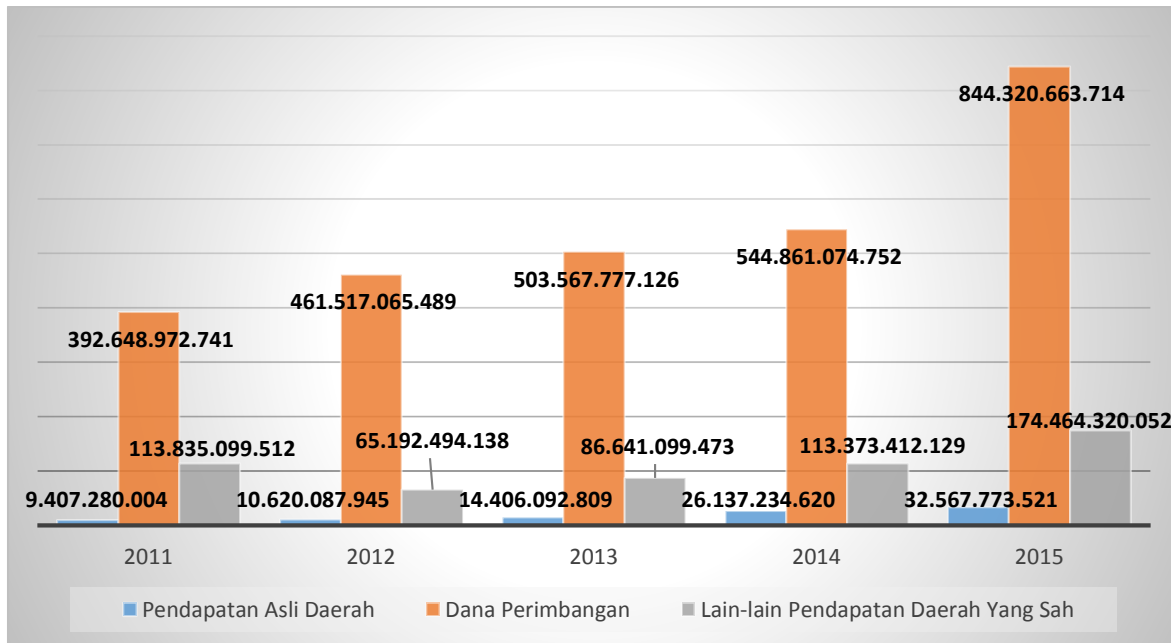
Gambar 3.1.
Kontribusi Sumber-Sumber Pendapatan Berdasarkan Struktur
Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah
Tahun 2011 – 2015
(Dalam Persentase)



Sumber: DPKPA & Bappeda Kab. Minahasa Selatan, 2016



Gambar 3.2.
Perkembangan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Struktur Pendapatan
Kebupaten Minahasa Selatan
Tahun 2011-2015



Sumber: DPKPA & Bappeda Kab. Minahasa Selatan, 2016

Realisasi pendapatan berdasarkan struktur pendapatan terbesar disumbangkan dari Dana Perimbangan pada tahun 2015 sebesar Rp. 844.320.663.714 diikuti Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 174.464.320.052 dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 32.567.773.521 (Gambar 3.2).

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan Pemerintah pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yaitu selisih antara aset dan



kewajiban. Rata-rata pertumbuhan neraca daerah Kabupaten Minahasa Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Minahasa Selatan

| Keterangan | Rata-Rata Pertumbuhan |
|--|--------------------------|
| ASET | |
| ASET LANCAR | |
| Kas | -9.00 |
| Piutang | 25.97 |
| Persediaan | 2.73 |
| | |
| Total Aset lancar | -1.57 |
| | |
| ASET TETAP | |
| Tanah | 84.85 |
| Peralatan dan Mesin | 2.65 |
| Gedung dan Bangunan | 12.92 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 10.56 |
| Aset Tetap Lainnya | -0.67 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 127.88 |
| Akumulasi Penyusutan | |
| | |
| Total Aktiva Tetap | 7.01 |
| | |
| ASET LAINNYA | |
| Tagihan Jangka Panjang | |
| Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | |
| | |
| Aset Tidak Berwujud | |
| Aset Lain-lain | 29140.42 |
| Investasi Jangka Panjang Non Permanen | 2.40 |
| | |
| Total Aset Lainnya | 960.46 |
| | |
| JUMLAH ASET DAERAH | 17.03 |
| | |
| KEWAJIBAN | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | -8.48 |



| | |
|--------------------------------------|--------|
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 169.48 |
| Utang Bunga | |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | |
| Pendapatan Diterima Dimuka | |
| Utang Pajak | |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | -16.18 |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | |
| Utang Dalam Negeri | |
| Utang Pemerintah Kabupaten Kota | |
| Total Kewajiban Jangka Panjang | -64.78 |
| Total Kewajiban | -11.21 |
| EKUITAS | |
| Ekuitas | 18.34 |
| Total Kewajiban dan Ekuitas Dana | 17.03 |

Sumber: DPKPA & Bappeda Kab. Minahasa Selatan, 2016

Aset lancar mengalami rata-rata pertumbuhan yang negatif, yaitu sebesar -1,57%. Rata-rata pertumbuhan piutang cukup tinggi, yaitu 25,97%. Sementara persediaan bertumbuh dengan rata-rata sebesar 2,73% dan kas bertumbuh negative sebesar -9,00%. Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan aset lancar sekalipun negative dapat diindikasikan bahwa pertumbuhan aset lancar bersifat konstan. Demikian juga dengan rata-rata pertumbuhan persediaan. Pertumbuhan kas negative mencerminkan bahwa sepanjang periode 2010 s/d 2015 jumlah kas makin hari makin dikurangi untuk menghindari uang menganggur (*idle cash*), dan risiko kehilangan, serta penyalahgunaan. Berbeda dengan kondisi piutang yang mengalami peningkatan tentunya memberikan signal bahwa terdapat kewajiban-kewajiban yang seharusnya diterima Pemerintah Daerah.

Secara kumulatif, rata-rata pertumbuhan aktiva tetap sebesar 7,01% hal ini dimaknai bahwa perkembangan total aset pemerintah



daerah selama 5 tahun terakhir relative konstan. Pertumbuhan tertinggi pada konstruksi dalam pengerjaan sebesar 127,88% dan penambahan kepemilikan tanah oleh pemerintah daerah sebesar 84,85%. Selain itu terjadi peningkatan pertumbuhan gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan dengan total 23,48%. Harus dirinci dari tahun 2010 berapa menjadi pada tahun 2015 untuk setiap aset. Secara keseluruhan pertumbuhan aset (aset lancar maupun aset tetap) sebesar 17,03%.

Selama periode 5 tahun terakhir terjadi trend penurunan kewajiban sebesar -11,21. Penurunan kewajiban jangka pendek (kurang dari 1 tahun) sebesar -16,18% sementara trend penurunan kewajiban jangka panjang sebesar 64,78%. Untuk ekuitas terjadi peningkatan sebesar 18,34%, dan total pertumbuhan kewajiban dan ekuitas dana sebesar 17,03%. Harus dirinci dari tahun 2010 berapa menjadi pada tahun 2015.

Selanjutnya, analisis rasio keuangan adalah membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk menganalisa laporan keuangan adalah analisis rasio. Analisis rasio adalah cara analisa dengan menggunakan perhitungan-perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang ditunjukkan dalam neraca maupun laba rugi. Pada dasarnya perhitungan rasio-rasio keuangan adalah untuk menilai kinerja keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinan dimasa depan. Rasio keuangan yang dapat digunakan dalam analisis keuangan adalah:

1. Rasio Likuiditas (*liquidity ratio*), yang menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri atas Rasio Lancar (*current ratio*) dan Rasio Cepat (*quick ratio*).
2. Rasio Sovabilitas (*solvency ratio*), yang menunjukkan kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang.



3. Rasio Aktivitas (*activity ratio*), menunjukkan tingkat efektifitas penggunaan aktiva atau kekayaan.

Tabel 3.3
Analisis Rasio Keuangan
Kabupaten Minahasa Selatan

| NO | Uraian | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---|------|------|------|
| 1. | Rasio lancar (<i>current ratio</i>) | 4.21 | 4.21 | 3.09 |
| 2. | Rasio quick (<i>quick ratio</i>) | 0.53 | 3.56 | 2.35 |
| 3. | Rasio total hutang terhadap total asset | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 4. | Rasio hutang terhadap modal | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 5. | Rata-rata umur piutang | 2.61 | 5.69 | 4.48 |
| 6. | Rata-rata umur persediaan | 1.13 | 1.03 | 0.82 |

Pada kondisi 3 tahun terakhir, rasio aktiva lancar sangat baik, yang mencerminkan posisi kas dan aktiva lancar lainnya sangat *liquid* untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Hal ini ditunjukkan oleh *current ratio* dan *quick ratio*. Selanjutnya rasio total hutang terhadap total aset cukup baik. Artinya, keberadaan aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat menutup seluruh kewajiban (hutang) pemerintah daerah kepada pihak ketiga. Demikian juga dengan rasio hutang terhadap modal, yang berarti total modal dapat menutup hutang pemerintah daerah. Kondisi piutang pemerintah daerah dilihat dari rata-rata umur piutang menunjukkan cukup lama pihak pemerintah daerah untuk menagihnya. Sementara rata-rata umur persediaan sangat baik dapat memenuhi kebutuhan persediaan selama satu tahun anggaran.



3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

a. Proporsi Realisasi Belanja Daerah di Banding Anggaran

Tabel 3.4
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Minahasa Selatan

| No. | Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | Rerata |
|-----|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| A | Belanja Tidak Langsung | 350.198.625.019 | 409.786.416.044 | 487.688.164.475 | |
| 1 | Belanja Pegawai | 317.941.217.539 | 365.641.722.804 | 386.633.402.165 | 86,43 |
| 2 | Belanja Bunga | - | - | - | |
| 3 | Belanja Subsidi | - | - | - | |
| 4 | Belanja Hibah | 6.763.500.000 | 7.200.000.000 | 28.958.008.960 | 3,21 |
| 5 | Belanja Bantuan Sosial | 9.045.000.000 | 8.444.000.000 | | 1,55 |
| 6 | Belanja Bagi Hasil | - | - | - | |
| 7 | Belanja Bantuan Keuangan | 16.418.907.480 | 28.500.693.240 | 71.866.506.632 | 8,79 |
| 8 | Belanja Tidak Terduga | 30.000.000 | - | 230.246.718 | 0,02 |



| | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| B | Belanja Langsung | 211.044.068.065 | 279.380.593.202 | 392.622.403.982 | |
| 1 | Belanja Pegawai | 28.409.745.754 | 18.466.378.600 | | 6,69 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 80.166.758.842 | 127.961.040.799 | 194.704.479.749 | 44,46 |
| 3 | Belanja Modal | 102.467.563.469 | 132.953.173.803 | 197.917.924.233 | 48,85 |

Sumber: DPKPA & Bappeda Kab. Minahasa Selatan, 2016



Total Belanja dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2013 s/d 2015) sebesar Rp. 2.130.720.270.787,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 247.673.205.538,- atau sebesar 58,564% dari Belanja Total dan Belanja Langsung sebesar Rp. 883.047.065.249 atau sebesar 41,44% dari total belanja . Trend Belanja Langsung dari tahun ke tahun semakin meningkat, terhitung semenjak tahun 2013 sebesar 37,60% menjadi 44,60% pada tahun 2015 sebaliknya Belanja Tidak Langsung menunjukkan trend yang menurun dari semula 62,40% pada tahun 2013 menurun menjadi 55,40% pada tahun 2015. Trend penurunan persentase Belanja Tidak Langsung dan sebaliknya terjadi peningkatan Belanja Langsung dari Belanja Total menunjukkan selama periode 3 tahun terakhir terjadi peningkatan kualitas belanja. Kondisi ini mencerminkan bahwa dari tahun ke tahun Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berupaya untuk menurunkan Belanja Tidak Langsung di bawah 50% dari Belanja Total, untuk memberikan kapasitas belanja daerah semakin baik dan berkualitas. Moratorium penerimaan ASN yang masih berlanjut ikut mendorong peningkatan kualitas belanja.

Persentase **Belanja Tidak Langsung** didominasi oleh Belanja Pegawai. Selama periode 2013 s/d 2015 rerata Belanja Pegawai dari Total Belanja Tidak Langsung sebesar 86,43%. Sekalipun Belanja Tidak Langsung dari Belanja Total di atas 50%, dan Belanja Pegawai mendominasi Belanja Tidak Langsung, dalam periode ini terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu 90,79% pada tahun 2013 menurun menjadi 86,43% pada tahun 2015.

Persentase Belanja Bantuan Keuangan pada periode yang sama dengan rerata sebesar 8,79% memiliki kecenderungan peningkatan dari tahun 2013 sebesar 4,69% meningkat menjadi 14,74%. Persentase Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sangat kecil dengan rerata masing-masing 3,21% dan 1,55%. Belanja Tidak Terduga dengan rerata 0,02%. Kondisi ini mencerminkan pengeluaran Belanja Daerah yang sangat baik dengan menekan belanja tak terduga. Hal ini juga memberikan indikasi bahwa kualitas belanja telah sesuai dengan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah.



Persentase **Belanja Langsung** didominasi secara hampir berimbang oleh Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa. Rerata Persentase Belanja Barang dan Jasa sebesar 44,46% sementara Belanja Modal sebesar 48,85%. Kondisi ini mencerminkan kualitas belanja yang cukup baik, sekalipun Belanja Langsung masih di bawah 50% dari Belanja Total. Persentase Belanja Pegawai dari Belanja Langsung memiliki kecenderungan dari 13,46% pada tahun 2013 menurun menjadai 6,61% pada tahun 2014. Pada tahun 2015 Belanja Pegawai Langsung tidak teranggarkan. Kondisi ini mencerminkan terjadi efisiensi pembayaran honor-honor kegiatan dari tahun ke tahun.



Tabel 3.5
Proyeksi Belanja Kabupaten Minahasa Selatan 2017-2021

| URAIAN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | BELANJA | 1.145.023.552.532 | 1.257.063.252.941 | 1.414.588.502.977 | 1.524.899.855.525 |
| Belanja Tidak Langsung | 634.343.048.103 | 696.413.042.129 | 770.955.499.620 | 836.337.413.658 | 907.376.449.164 |
| Belanja Pegawai | 469.250.540.150 | 506.790.583.362 | 547.333.830.031 | 591.120.536.433 | 638.410.179.348 |
| Belanja Bunga | | | | | |
| Belanja Subsidi | | | | | |
| Belanja Hibah | 5.799.566.742 | 5.852.590.062 | 5.906.098.155 | 5.960.095.453 | 6.014.586.428 |
| Belanja Bantuan Sosial | | | | | |
| Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 156.954.406.234 | 195.789.364.243 | 215.368.300.668 | 236.905.130.734 | 260.595.643.808 |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 1.299.186.098 | 1.301.846.937 | 1.304.513.225 | 1.307.184.974 | 1.309.862.195 |
| Belanja Tidak Terduga | 1.039.348.879 | 1.041.051.815 | 1.042.757.542 | 1.044.466.064 | 1.046.177.385 |
| Belanja Langsung | 510.680.504.429 | 560.650.210.812 | 643.633.003.356 | 688.562.441.867 | 780.731.347.942 |
| Belanja Pegawai | 22.398.192.336 | 28.032.510.540,59 | 32.181.650.167,82 | 34.428.122.093,36 | 39.036.567.397,09 |
| Belanja Barang dan Jasa | 221.204.022.286 | 196.227.573.784,13 | 225.271.551.174,75 | 240.996.854.653,54 | 273.255.971.779,63 |
| Belanja Modal | | | | | |



| | | | | | |
|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 267.078.289.808 | 336.390.126.487,08 | 386.179.802.013,86 | 413.137.465.120,35 | 468.438.808.765,08 |
| Jumlah Belanja | 1.145.023.552.532 | 1.257.063.252.941 | 1.414.588.502.977 | 1.524.899.855.525 | 1.688.107.797.105 |



b. Analisis Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Tabel 3.6
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

| No. | Uraian | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| A | Belanja Tidak Langsung | 317.941.217.539 | 365.641.722.804 | 386.049.600.465 |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 240.426.593.776 | 338.357.953.815 | 358.758.639.827 |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 74.808.922.963 | 26.720.956.489 | 25.921.060.638 |
| 3 | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH | 903.900.000 | 150.000.000 | 953.900.000 |
| 4 | Belanja Pemungutan Pajak Daerah | 195.000.000 | 170.750.000 | 116.000.000 |
| 5 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 1.606.800.800 | 242.062.500 | 300.000.000 |
| B | Belanja Langsung | 60.466.143.895 | 62.161.118.989 | 59.390.393.216 |
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 11.878.367.300 | 14.550.206.000 | 16.527.669.500 |
| 2 | Belanja Uang Lembur | 284.126.100 | 454.047.600 | 583.801.700 |
| 3 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS | 1.933.984.450 | 4.250.000 | 517.815.000 |
| 5 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan | 2.889.536.000 | 5.607.643.800 | 6.318.431.450 |
| 6 | Belanja Makanan dan Minuman Pegawai | 7.883.040.901 | 8.969.554.363 | 9.100.530.274 |
| 7 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 1.160.600.999 | 1.375.779.275 | 1.076.593.500 |
| 8 | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu | 397.405.250 | 1.112.245.635 | 1.550.006.986 |



| | | | | |
|----|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 9 | Belanja Perjalanan Dinas | 17.339.275.675 | 17.827.044.635 | 20.297.559.101 |
| 10 | Belanja Perjalanan Pindah Tugas | 0 | 0 | |
| 11 | Belanja Pemulangan Pegawai | 14.750.000 | 0 | |
| 12 | Belanja Modal | 16.685.057.220 | 12.260.347.681,0 0 | 3.417.985.705,00 |
| | Total | 378.407.361.434 | 427.802.841.79 3 | 445.439.993.68 1 |

Sumber: DPKPA & Bappeda Kab. Minahasa Selatan, 2016



Tabel 3.7
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

| No, | Uraian | Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) | Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) | Prosentase |
|-----|---------------------|---|---|------------------|
| | | (a) | (b) | (a) / (b) x 100% |
| 1 | Tahun Anggaran 2013 | 378.407.361.434 | 414.343.708.746 | 91% |
| 2 | Tahun Anggaran 2014 | 427.802.841.793 | 430.189.874.059 | 99% |
| 3 | Tahun Anggaran 2015 | 445.439.993.681 | 456.759.107.736 | 98% |

Sumber: DPKPA & Bappeda Kab. Minahasa Selatan, 2016



Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan selama periode 2013 s/d 2015 menunjukkan kecenderungan peningkatan yang sangat signifikan, dari 91% pada tahun 2013 meningkat menjadi 98% pada tahun 2015. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan memiliki kemampuan yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan aparatur pemerintah saat ini dan di masa mendatang. Berbanding terbalik dengan proporsi pembiayaan pengeluaran yang semakin berkurang dari 9% pada tahun 2013 menurun menjadi 2% pada tahun 2015.



c. Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta Prioritas Utama

**Tabel 3.8
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**

| No | Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| A | Belanja Tidak Langsung | 257.749.401.256 | 367.008.647.055 | 431.579.046.459 | 29,99 |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 240.426.593.776 | 338.357.953.815 | 358.758.639.827 | 23,38 |
| 2 | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH | 903.900.000 | 150.000.000 | 953.900.000 | 226,26 |
| 3 | Belanja Bunga | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Belanja Bagi Hasil | 16.418.907.480 | 28.500.693.240 | 71.866.506.632 | 112,87 |
| B | Belanja Langsung | 21.875.379.288 | 47.241.033.366 | 56.424.991.493 | 67,70 |
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 11.878.367.300 | 14.550.206.000 | 16.527.669.500,00 | 18,04 |
| 2 | Belanja Beasiswa pendidikan PNS | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | Belanja Jasa Kantor | 8.748.334.038 | 31.521.242.222 | 38.973.598.917 | 141,98 |
| 4 | Belanja Sewa Gedung Kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) | 843.442.950 | 973.886.309 | 815.059.076 | |



| | | | | | |
|----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 5 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) | 405.235.000 | 195.698.835 | 108.664.000 | |
| C | Pembiayaan Pengeluaran | 10.006.615.269 | 2.647.187.185 | 969.355.000 | -68,46 |
| 1 | Pembentukan dana cadangan | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Pembayaran Pokok Utang | 10.006.615.269 | 2.647.187.185 | 969.355.000 | -68,46 |
| | TOTAL (A+B+C) | 289.631.395.813 | 416.896.867.606 | 488.973.392.952 | 30,61 |

Sumber: DPKPA & Bappeda Kab. Minahasa Selatan, 2016



Dilihat dari proporsi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama menunjukkan selang periode 2013 s/d 2015 didominasi Belanja Tidak Langsung sebesar 88,36%. Proporsi untuk Belanja Langsung dan Pembiayaan Pengeluaran masing-masing sebesar 10,50% dan 1,14%.

Persentasi proporsi Belanja Tidak Langsung menunjukkan trend yang konstan dengan rerata pertumbuhan sebesar 88,43% dan dengan trend pertumbuhan yang cenderung menurun, yaitu dari 42,39% pada tahun 2014 dan menurun menjadi 17,59% pada tahun 2015.

Sekalipun dari segi jumlah nominal Belanja Tindak Langsung memiliki kecenderungan yang meningkat selama periode 2013 s/d 2015. Pada tahun 2013 sebesar Rp. 257.749.401.256 meningkat menjadi 431.579.046.459. Proporsi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dilihat dari Belanja Langsung menunjukkan terjadi peningkatan dengan rerata sebesar 10,14% namun sekalipun demikian dilihat dari persentasi rerata pertumbuhan menunjukkan penurunan yang cukup tajam, yaitu dari 115,96% pada tahun 2014 menurun menjadi 19,44% pada tahun 2015.

Proporsi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dilihat dari Pembiayaan Pembangunan sangat kecil dengan rerata 1,14% kendatipun secara persentase pertumbuhan mengalami trend negatif. Secara keseluruhan belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama mengalami peningkatan secara nominal namun secara persentase pertumbuhan mengalami kecenderungan menurun. Pada tahun 2013 belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas sebesar Rp. 289.631.395.813,- meningkat menjadi Rp. 488.973.392.952,-.



d. Analisis Proyeksi Belanja Daerah

Tabel 3.9
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta Prioritas Utama

| No. | Uraian | Data Tahun Dasar (Rp) 2015 | Tingkat Pertumbuhan (%) | Proyeksi | | | | |
|-----|---|----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
| A | Belanja Tidak Langsung | 431.579.046.459 | | 610.327.351.299 | 634.343.048.103 | 696.413.042.129 | 770.955.499.620 | 836.337.413.658 |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 358.758.639.827 | 83,13 | 507.346.712.492 | 527.310.236.649 | 578.907.149.923 | 640.872.045.759 | 695.222.058.212 |
| 2 | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH | 953.900.000 | 0,22 | 1.348.979.440 | 1.402.060.268 | 1.539.250.819 | 1.704.008.703 | 1.848.519.444 |
| 3 | Belanja Bunga | - | - | - | | | | |
| 4 | Belanja Bagi Hasil | 71.866.506.632 | 16,65 | 101.631.659.367 | 105.630.751.186 | 115.966.641.387 | 128.379.445.159 | 139.266.836.002 |
| B | Belanja Langsung | 56.424.991.493 | 14,37 | 66.333.258.767 | 73.384.788.486 | 80.565.435.294 | 92.490.062.582 | 98.946.422.896 |
| 1 | Belanja Honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis | 16.527.669.500 | 29,29 | 19.429.939.620 | 21.495.431.339 | 23.598.743.259 | 27.091.633.440 | 28.982.791.713 |



| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | - | - | - | | | | |
| 3 | Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti Listrik, Air, Telpon dan sejenisnya) | 38.973.598.917,00 | 69,07 | 45.817.389.664 | 50.687.988.379 | 55.647.770.228 | 63.884.291.473 | 68.343.797.636 |
| 4 | Belanja Sewa Gedung Kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) | 815.059.076,00 | 1,44 | 958.184.010 | 1.060.043.366 | 1.163.767.818 | 1.336.019.075 | 1.429.281.208 |
| 5 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) | 108.664.000,00 | 0,19 | 127.745.473 | 141.325.403 | 155.153.988 | 178.118.594 | 190.552.339 |
| C | Pengeluaran Pembiayaan | - | | | | | | |
| 1 | Pembentukan Dana Cadangan | | - | | | | | |
| 2 | Pembayaran Pokok Utang | | - | | | | | |



| | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA | 488.004.037.95 2,00 | | 676.660.610.06 5,82 | 707.727.836.58 9,30 | 776.978.477.42 3,11 | 863.445.562.20 2,75 | 935.283.836.55 4,49 |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|

Sumber: DPKPA & Bappeda Kab. Minahasa Selatan, 2016



Bila asumsi pertumbuhan 93,79% atau rerata pertumbuhan sebesar 41,42% maka proyeksi untuk Total Belanja sebesar Rp. 488.004.037.952,- pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 935.283.836.554,49 pada tahun 2020. Belanja Tidak Langsung meningkat dari Rp. 71.866.506.632,- pada periode yang sama menjadi Rp. 836.337.413.658,-. Belanja Langsung meningkat dari Rp. 56.424.991.493,- pada periode yang sama menjadi Rp. 98.946.422.896,-.

3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

a. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Tabel 3.10
Penutup Defisit Riil Anggaran

| No. | Uraian | 2013 (Rp) | 2014 (Rp) | 2015 (Rp) |
|-----|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 1. | Realisasi Pendapatan Daerah dikurangi Realisasi | 604.614.969.408 | 684.371.721.501 | 868.991.454.402 |
| 2. | Belanja Daerah | 561.242.693.084 | 689.167.009.246 | 808.444.061.825 |
| 3. | Transfer | | | 71.866.506.632 |
| 3. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 12.506.615.269 | 2.647.187.185 | 969.355.000 |
| A. | Defisit Riil | 30.865.661.055 | (7.442.474.930) | (12.288.469.055) |
| | Ditutup oleh realisasi penerimaan Pembiayaan | | | |
| 4. | Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya | 31.105.167.165 | 61.970.828.220 | 54.444.870.575 |
| 7. | Penerimaan pinjaman daerah | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Penerimaan piutang daerah | 0 | 0 | 0 |
| B. | Total Realisasi penerimaan pembiayaan daerah | 31.105.167.165 | 61.970.828.220 | 54.444.870.575 |
| A-B | Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun | 61.970.828.220 | 54.528.353.289 | 42.165.401.520 |



| | | | |
|-----------|--|--|--|
| berkenaan | | | |
|-----------|--|--|--|

Sumber: DPKPA & Bappeda Kab. Minahasa Selatan, 2016

Defisit riil anggaran tahun 2013, 2014 dan 2015 dapat ditutupi dengan Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. SILPA menjadi satu-satunya sumber pembiayaan untuk menutupi defisit riil anggaran. Namun menurut peraturan Kementerian keuangan, penggunaan SILPA hanya boleh untuk satu tahun kedepan (Silpa tahun ke-0 membiayai defisit riil tahun ke n+1), untuk tahun kedua sudah tidak bisa digunakan lagi (disetor ke kas negara). Untuk itu diperlukan perencanaan dan penganggaran yang efisien dan daya serap anggaran yang tinggi dimasa depan.

Tabel 3.11
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

| No | Uraian | Proporsi dari total defisit riil | | |
|----|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2013 (Rp) | 2014 (Rp) | 2015 (Rp) |
| 1 | Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun Anggaran sebelumnya | 31.105.167.16 5 | 61.970.828.2 20 | 54.528.353.2 89 |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Penerimaan pinjaman daerah | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Penerimaan Piutang Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | 61.970.828.22 0 | 54.528.353.2 89 | 42.156.401.5 20 |

Sumber: DPKPA & Bappeda Kab. Minahasa Selatan, 2016

Dari sisi komponen pembiayaan penutup defisit riil anggaran 100% berfokus pada SILPA tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan sumber pembiayaan non SILPA tidak ada. Dimasa depan perlu dibentuk pos pos lain



selain SILPA untuk menutupi defisit rill anggaran. Namun hal ini perlu dibuat kebijakan pembiayaan yang terencana dengan baik. Sumber dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan berarti pemerintah daerah harus memiliki kebijakan penyertaan modal pada BUMD. Sumber penerimaan pinjaman daerah (berupa bunga) dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah (pokok pinjaman atau prinsipal atau baki pinjaman) berarti pemerintah daerah memiliki kebijakan pemberian pinjaman daerah di tahun tahun sebelumnya. Penerimaan piutang daerah berarti pemerintah daerah harus memiliki kebijakan piutang.



b. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tabel 3.12
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kab. Minahasa Selatan

| No. | Uraian | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Rata - Rata Pertumbuhan |
|-----|--|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| | | Rp | % dari SILPA | Rp | % dari SILPA | Rp | % dari SILPA | |
| 1. | Jumlah SiLPA | 31.105.167.165 | | 61.970.828.220 | | 54.444.870.575 | | 0 |
| 2. | Pelampauan Penerimaan PAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Pelampauan Penerimaan Lain-Lain, Pendapatan Daerah yang Sah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya | 21.911.363.288 | 70.44 | 46.251.590.326 | 74.63 | 0 | 0 | 72.54 |
| 6. | Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Kegiatan lanjutan | 9.898.617.467 | 31.82 | 15.719.237.894 | 25.37 | 0 | 0 | 28.59 |

Sumber: DPKPA & Bappeda Kab. Minahasa Selatan, 2016

Di tahun 2015 terjadi penurunan SILPA dibanding dengan tahun 2014. Namun komposisi pembangun SILPA terletak pada pos Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya dan kegiatan lanjutan (*multy year*) untuk tahun 2013 dan 2014.

c. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tabel 3.13
Sisa Lebih Riil Kab. Minahasa

| No | Uraian | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Saldo kas neraca daerah | 62.441.684.637 | 53.896.033.476 | 46.601.763.864 |
| | Dikurangi: | | | |
| 2. | Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | 31.604.426.535 | 13.759.272.736 | 14.850.472.556 |
| 3. | Kegiatan Lanjutan | 9.898.617.467 | 15.719.237.894 | 21.069.921.165 |
| | Sisa lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran | 20.938.640.635 | 24.417.522.846 | 10.681.370.143 |

Sumber: DPKPA & Bappeda Kab. Minahasa Selatan, 2016



Selisih lebih (rill) pembiayaan anggaran menunjukkan trend menurun dari tahun ke tahun. Pos kas dalam neraca daerah akan merepresentasikan kemampuan likuiditas pembiayaan di tahun berikutnya (*cash management*) khususnya pada likuiditas kas pada triwulan pertama tahun berikutnya. Saldo kas pada tahun 2013 dominan digunakan untuk pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan namun kewajiban ini relatif menurun sampai tahun 2015. Ini menunjukkan kondisi yang baik karena mengurangi hutang daerah pada pihak ketiga. Seiring dengan penurunan kewajiban daerah kepada pihak ketiga maka mulai tahun 2014 alokasi untuk kegiatan lanjutan (*multy year*) memiliki proporsi yang cenderung meningkat.



d. Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah

**Tabel 3.14
Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran**

| No | Uraian | Data tahun dasar (Rp) | Tingkat pertumbuhan (%) | Proyeksi | | | | |
|----|---|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Saldo kas neraca daerah | 46,601,763,864 | 13.53 | 40,296,545,213 | 34,844,422,646 | 30,129,972,262 | 26,053,387,015 | 22,528,363,752 |
| | Dikurangi: | | | | | | | |
| 1. | Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | 14,850,472,556 | 7.93 | 14,850,472,556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kegiatan lanjutan | 21,069,921,165 | 34.04 | 15,832,839,529 | 26,192,512,830 | 21,478,062,446 | 18,266,668,181 | 14,741,644,917 |
| | Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran | 10,681,370,143 | 56.26 | 9,613,233,129 | 8,651,909,816 | 8,651,909,816 | 7,786,718,834 | 7,786,718,834 |

Sumber: DPKPA & Bappeda Kab. Minahasa Selatan, 2016



Dengan mengasumsikan bahwa pos kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun yang belum terselesaikan diselesaikan pada tahun 2016 dan bahwa saldo kas di neraca daerah harus tersedia untuk menjamin likuiditas pembiayaan minimal triwulan pertama tahun anggaran setelahnya dan adanya kebijakan perencanaan dan penganggaran yang semakin efisien serta daya serap anggaran dimasa depan yang semakin besar maka diperoleh SILPA yang terus mengecil setiap tahun proyeksi.



3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Tabel 3.15
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Minahasa Selatan

| No | Uraian | 2015 (Rp) | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|----|---|-----------------|---------------------------------|
| A | Belanja Tidak Langsung | 415.007.609.425 | 9 |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 358.758.639.827 | 23 |
| 2 | Tambahan Penghasilan PNS | 25.921.060.638 | -34 |
| 3 | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH | 953.900.000 | 226 |
| 4 | Belanja Bunga | 0 | - |
| 5 | Belanja Bagi Hasil | 0 | - |
| 6 | Belanja Pemungutan Pajak Daerah | 116.000.000 | -22 |
| 7 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 300.000.000 | -31 |
| 8 | Belanja Hibah | 28.958.008.960 | 154 |
| 9 | Belanja Bantuan Sosial | 0 | -53 |
| 10 | Belanja Bantuan Keuangan pada Pemerintah Desa & Partai Politik | 0 | -13 |
| 11 | Belanja Tidak Terduga | 0 | - |
| B | Belanja Langsung | 195.288.281.449 | 34 |
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 0 | -39 |
| 2 | Honorarium Non PNS | 0 | -89 |
| 3 | Uang Lembur | 583.801.700 | 44 |
| 4 | Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 0 | - |



| No | Uraian | 2015 (Rp) | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|----|---|-----------------|---------------------------------|
| 5 | Honorarium Peserta | 0 | - |
| 6 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan BinteK PNS | | - |
| 7 | Belanja Barang dan Jasa | 194.704.479.749 | 56 |
| 8 | Belanja Sewa Gedung Kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) | 0 | - |
| 9 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) | 0 | - |
| 10 | Belanja Modal | 197.917.924.233 | 39 |
| C | Pembiayaan Pengeluaran | 969.355.000 | -71 |
| 1 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 0 | - |
| 2 | Pembayaran Pokok Utang | 969.355.000 | - |
| | TOTAL (A+B+C) | 809.183.170.425 | 19 |

Sumber: DPKPA & Bappeda Kab. Minahasa Selatan, 2016

Komposisi belanja yang bersifat Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama terhadap total penerimaan masih sangat besar (dominan) untuk tahun 2015. Besarnya komposisi belanja ini menunjukkan bahwa fleksibilitas pengalokasian belanja untuk mendukung program-program unggulan atau terobosan dari Kepala Daerah menjadi kecil. Hal ini disebabkan sebagian besar anggaran akan tersita pada pembiayaan program-program rutin, wajib, mengikat dan prioritas utama yang sebagian besar alokasi anggaran pada jenis ini adalah digunakan untuk pembiayaan tujuan tujuan dari pemerintah pusat. Sedangkan program unggulan atau terobosan dari Kepala Daerah (sesuai visi dan misi) menjadi kurang didukung oleh anggaran dan akan mempengaruhi proses pencapaiannya di kemudian hari.



3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Tabel 3.16
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah

| Uraian | Proyeksi | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Pendapatan | 1.071.936.667.700 | 1,166,602,751,257 | 1,279,705,117,297 | 1,438,264,942,790 | 1,549,618,376,430 |
| Pencairan dana cadangan (sesuai perda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Perhitungan Anggaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Penerimaan | 1.071.936.667.700 | 1,166,602,751,257 | 1,279,705,117,297 | 1,438,264,942,790 | 1,549,618,376,430 |
| Dikurangi: | | | | | |
| Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama | 676.660.610.066 | 711,627,678,267 | 780,620,121,551 | 877,341,615,102 | 945,267,209,622 |
| Kapasitas Riil kemampuan keuangan | 395.276.057.634 | 454,975,072,990 | 499,084,995,746 | 560,923,327,688 | 604,351,166,808 |

Sumber: DPKPA & Bappeda Kab. Minahasa Selatan, 2016



Dari hasil proyeksi kapasitas rill kemampuan keuangan diharapkan meningkat di masa depan (diatas 30 % dari total penerimaan daerah). Peningkatan ini akan menunjukkan semakin besarnya alokasi belanja yang dapat digunakan untuk membiayai program terobosan dari kepada daerah misalnya : membiayai program program baru atau inovatif, untuk penyertaan modal pada program atau kegiatan yang produktif serta pemberian pinjaman daerah kepada daerah lainnya.



Tabel 3.17
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil
Kemampuan Keuangan Daerah

| No | Uraian | Proyeksi | | | | |
|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| I | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan | 395.276.057.634 | 437.295.715.943 | 480.084.775.518 | 551.142.940.774 | 614.334.539.876 |
| | Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I | 276.693.240.344 | 306.107.001.160 | 336.059.342.863 | 385.800.058.542 | 430.034.177.913 |
| II.a | Belanja Langsung | 461.609.316.401 | 510.680.504.429 | 560.650.210.812 | 643.633.003.356 | 688.562.441.867 |
| II.b | Pembentukan Dana Cadangan | - | - | - | - | - |
| | Dikurangi : | | | | | |
| II.c | Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama | 276.693.240.344 | 306.107.001.160 | 336.059.342.863 | 385.800.058.542 | 430.034.177.913 |
| II.d | Pengeluaran Pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama | - | - | - | - | - |
| II. | Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II a +II b-IIc-IId) | 184.916.076.057 | 204.573.503.269 | 224.590.867.949 | 257.832.944.815 | 258.528.263.954 |



| | | | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Sisa kapasitas riil keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran I (I-II) | 210.359.981.577 | 232.722.212.673 | 255.493.907.569 | 293.309.995.960 | 355.806.275.921 |
| | Rencana alokasi pengeluaran Prioritas II | 98.819.014.409 | 109.323.928.986 | 120.021.193.880 | 137.785.735.194 | 153.583.634.969 |
| III.a | Belanja Tidak Langsung | 610.327.351.299 | 634.343.048.103 | 696.413.042.129 | 770.955.499.620 | 836.337.413.658 |
| | Dikurangi : | | | | | |
| III.b | Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama | 451.485.107.501 | 469.250.540.150 | 506.790.583.362 | 547.333.830.031 | 591.120.536.433 |
| III | Total Rencana Pengeluaran Prioritas II (IIIa-IIIb) | 158.842.243.798 | 165.092.507.953 | 189.622.458.768 | 223.621.669.589 | 245.216.877.225 |
| | Surplus anggaran riil atau berimbang (I-II-III) | 51.517.737.779,10 | 67.629.704.720,41 | 65.871.448.801,30 | 69.688.326.370,20 | 110.589.398.696,03 |

Sumber: DPKPA & Bappeda Kab. Minahasa Selatan, 2016



Alokasi kemampuan rill keuangan daerah akan lebih dominan dialokasikan pada program atau kegiatan prioritas I. ini untuk menjamin bahwa urusan urusan atau tujuan tujuan yang utama pada prioritas I bisa tercapai sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi dasarnya bagi daerah dan masyarakatnya. Namun juga terdapat surplus anggaran rill atau berimbang yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai program program terobosan dan aspek program produktif lainnya oleh Kepala Daerah, dan jumlah anggaran ini meningkat setiap tahun proyeksi.



Tabel 3.18
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

| No | Jenis Dana | Alokasi | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------|-----------------|-------|-----------------|-----------|-----------------|----------|-----------------|---------|-----------------|
| | | 2016 | | 2017 | | Tahun III | | Tahun IV | | Tahun V | |
| | | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp |
| 1. | Prioritas I | 40,06 | 184.916.076.057 | 40,06 | 204.573.503.269 | 40,06 | 224.590.867.949 | 40,06 | 257.832.944.815 | 37,55 | 258.528.263.954 |
| 2. | Prioritas II | 34,41 | 158.842.243.798 | 32,33 | 165.092.507.953 | 33,82 | 189.622.458.768 | 38,10 | 245.216.877.225 | 35,61 | 245.216.877.225 |
| 3. | Prioritas III | 11,16 | 51.517.737.779 | 13,24 | 67.629.704.720 | 11,75 | 65.871.448.801 | 17,18 | 110.589.398.696 | 16,06 | 110.589.398.696 |

Sumber: DPKPA & Bappeda Kab. Minahasa Selatan, 2016

Proyeksi alokasi pendanaan kapasitas riil keuangan daerah disesuaikan dengan program atau kegiatan berbasis pada prioritas. Prioritas I akan mendapat alokasi yang lebih besar dibanding dengan prioritas II dan III. Ini rasional untuk menjamin bahwa anggaran dari kapasitas riil keuangan daerah mampu untuk menjaga standart pelayanan minimal (SPM) kepada masyarakat.

